

**OPTIMALISASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT TIDAK MAMPU
(Studi Peran Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ARLISA KHATELIA DEWI

C100160195

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN
OPTIMALISASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT TIDAK MAMPU

**(Studi Peran Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ARLISA KHATELIA DEWI

C100160195

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Darsono S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**OPTIMALISASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

**(Studi Peran Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta)**

OLEH

ARLISA KHATELIA DEWI

C100160195

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 22 Juni 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

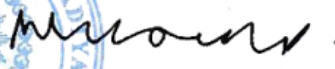
Dewan Penguji:

1. Darsono, S.H, M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H, M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Nuswardhani, S.H, S.U.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Juni 2020

Penulis



ARLISA KHATELIA DEWI
C100160195

**OPTIMALISASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT TIDAK MAMPU
(Studi Peran Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan pengaturan tentang Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian analitis. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara kemudian dianalisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Undang- Undang No 16 tahun 2011 yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya beberapa lembaga terkait. pemberian bantuan hukum yang ada di Indonesia telah berjalan dengan baik ditambah adanya pengawasan secara langsung maka masyarakat-masyarakat khususnya yang menjadi sasaran Undang- Undang No 16 Tahun 2011 tersebut dapat mengakses bantuan hukum tersebut secara gratis. Peran dari LBH dalam proses penyelesaian perkara perdata didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya, dalam peradilan perdata, yang dimana hakim mengejar kebenaran formil sehingga penting sekali fungsi LBH sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar, karena dalam perkara perdata inisiatif mengajukan gugatan datangnya dari pihak yang bersangkutan yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain.

Kata Kunci: bantuan hukum, masyarakat tidak mampu, lembaga bantuan hukum

Abstract

This study aims to determine how the application of regulations on Legal Aid Institutions based on Law Number 16 Year 2011. How is the role of Legal Aid Institutions in solving civil disputes. The research method used is empirical juridical with the type of analytical research. The data source consists of primary data, which are the results of interviews and secondary data, namely primary and secondary legal data. Data collection methods by observation and interview were then analyzed qualitatively. From the results of the study showed that with the Act No. 16 of 2011 which was then followed up with the existence of several related institutions. the provision of legal aid in Indonesia has been going well, plus there is direct supervision so that communities specifically targeted by Law No. 16 of 2011 can access the legal assistance free of charge. The role of LBH in the process of settling civil cases is based on the legal services they provide, in civil litigation, where the judge pursues formal truth so that it is very important that the LBH function as a companion of his law blind client to pass each court process with the correct procedures, because in the case civil initiative filed a lawsuit

coming from the parties concerned who feel their rights are violated or harmed by others.

Keywords: legal aid, poor people, legal aid institutions

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Yang dimaksud dengan Negara hukum adalah suatu Negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (Entah, 2016). Di dalam Negara Hukum, Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara yang merupakan konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hokum (Wilujeng, 2013). Hal ini dilakukan tanpa dipengaruhi oleh pembedaan latar belakang, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) termaktub dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Aedi dan Samekto, 2013).

Persamaan dihadapan hukum berlaku bagi setiap orang maka harus diimbangi dengan persamaan perlakuan. Menurut Aristoteles, keadilan harus diberikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali (Aminah & Sihombing, 2009). Hukum seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum, namun hukum seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat, kaya dan berkuasa (Ginsberg, 2003). Padahal jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 17,18,19, dan 34. Tata hukum mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat setiap manusia. Kehadiran hukum justru harus menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama (Hendra, 2012).

Untuk menentukan terciptanya persamaan dimuka hukum maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk mewujudkan prinsip dan tujuan tersebut dengan dibentuknya Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para aparat penegak hukum terutama advokat yang memiliki tugas sebagai pemberi bantuan hukum, advokat diminta untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu (Winarta, 2011).

Peran Lembaga bantuan hukum bukanlah semata-mata untuk membela kepentingan salah satu pihak untuk bebas dari segala tuntutan dan gugatan, tetapi merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dihadapan hukum tujuan pembelaan dalam penyelesaian perkara pada hakekatnya adalah untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara (Harahap. 2006).

Perlunya diadakan optimalisasi dalam melakukan penerapan dalam memberikan bantuan hukum disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bantuan hukum yang cenderung memprihatinkan. Faktanya hukum di Indonesia itu lebih condong tajam kebawah dan tumpul keatas. Dengan alasan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus perdata.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dari sisi yuridis penelitian akan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan hukum formal yang berlaku atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soekanto dan Mamudji, 2012). Sementara ini sisi empiris yang akan digunakan adalah data yang didapat dari wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber, akan dianalisis secara empiris kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Indonesia

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi ditengah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum dilakukan pengadilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat (Sutiyoso, 2010). Apalagi bagi masyarakat tidak mampu yang tidak mengerti tentang hukum. Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dalam mendapat keadilan. Terhadap hal ini maka disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak mampu (Syahrani, 1978).

Dari segi bahasa bantuan hukum dikenal dengan istilah legal aid atau legal service. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara pada kalangan masyarakat pencari keadilan. Lebih dari itu, bantuan hukum dengan segala bentuknya juga merupakan representasi dari akses mendapat keadilan dalam konteks semua orang sama kedudukannya dimuka hukum (Kusnadi, 2012).

Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice*, dan *fair trial*.

Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum

(organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

Dari hasil penelitian di BKBH Universitas Muhammadiyah Surakarta menyebutkan bahwa ada beberapa faktor pendukung yang membuat Bantuan hukum berjalan dengan baik. Adapun faktor pendukung tersebut sebagai berikut :

- a. Adanya Undang-Undang yang jelas yang merupakan fasilitas yang legal dari Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang yang jelas tidak lagi perlu memikirkan tentang dana. Tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum untuk lebih dapat bergerak bebas dan leluasa tetapi tetap dalam koridor hukum di dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat luas khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu.
- b. Ditindak lanjuti dengan adanya BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) yang bekerjasama dengan kementerian Hukum dan HAM setiap wilayah untuk membentuk dan mengawasi kinerja dari Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum untuk yang sudah terakreditasi.
- c. Syarat Memberi Dan Menerima Bantuan Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dalam memberikan atau meminta bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang no 16 tahun 2011. Masyarakat tidak mampu yang ingin meminta bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam pasal 14 : mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Setelah persyaratan yang telah disebutkan dalam pasal 14 tersebut telah dipenuhi maka proses selanjutnya adalah tata cara yang telah diatur dalam Pasal 15 yaitu : Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penulis telah melakukan penelitian mengenai tata cara pengajuan pemberian bantuan hukum ke Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kemudian disebut BKBH Universitas Muhammadiyah Surakarta. Menurut BKBH Universitas Muhammadiyah Surakarta Pengaturan pemberian bantuan hukum yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik, dengan adanya Undang-Undang No 16 tahun 2011 yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dan kemudian ditindak lanjuti dengan Kementrian Hukum dan HAM yang membentuk OBH (Organisasi Bantuan Hukum) atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang sudah disertifikasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 membawa angin segar dalam sejarah bantuan hukum di Indonesia.

Tidak ada kendala terkait dengan peraturan tentang bantuan hukum BKBH UMS, dengan mekanisme baru yang diamanatkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Yang menjadi perbedaannya adalah pada sistem administrasinya terkait dengan pelaporan kepada BPHN (Badan Pengembangan Hukum Nasional). Untuk langkah pelaksanaan bantuan hukum BKBH UMS berkoordinasi dengan BPHN secara intens untuk memperbaiki kinerjanya sehingga meminimalisir kesalahan administrasi selain proses itu harus dilakukan dengan tertib dan cermat. Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa terlayani dengan baik karena status staf BKBH disana adalah murni seorang advokat. Namun, jumlah advokat yang hanya berjumlah minim menjadi salah satu kendala dalam menjalankan bantuan hukum.

3.2 Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.

3.2.1 Tujuan Dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum. Melalui gerakan bantuan hukum kita harus merebut Hak Asasi Manusia rakyat miskin yang telah cukup lama ditawan orang-orang kaya, meski harus disadari bahwa bantuan hukum saja tidak cukup (Kusumawati, 2016).

Sedangkan Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan hukum. Yang dalam hal ini pemberi bantuan hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

3.2.2 Jenis Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum Swasta muncul dan berkembang belakangan ini. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang Pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan: Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu; Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya “diperkosa”; Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana; Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma.

Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi. Organisasi yang bernaung di bawah Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum baik negeri maupun swasta pada umumnya menggunakan nama Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), sekalipun pada beberapa kampus menyebutnya dengan

nama LBH. Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga inipun hampir sama dengan Lembaga Bantuan Hukum swasta (Winarta, 2000).

3.2.3 Fungsi dan Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Proses Menyelesaikan Sengketa Perdata

Fungsi dari LBH dalam proses penyelesaian perkara perdata didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya. Semua jasa yang diberikannya ini diberikan secara Cuma-Cuma dan dalam peradilan perdata, yang dimana hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan sehingga penting sekali fungsi LBH sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar. Karena dalam perkara perdata inisiatif mengajukan gugatan datangnya dari pihak yang bersangkutan atau dari pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Untuk itu dalam mencari bantuan hukum juga harus mencari sendiri tidak dicarikan oleh Hakim. Hal ini juga menjadi Peranan Lembaga Bantuan Hukum untuk lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus yang miskin ataupun yang buta hukum bahwa mereka juga mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum, tidak pasrah karena tidak dapat membayar jasa Advokat. Dalam proses peradilan perdata ini terdiri dari tahap-tahap yang dilewati untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Lembaga Bantuan Hukum sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses peradilan perdata. Peranan ini diarahkan pada hal yang bersifat teknis yang tentu sulit dipahami oleh orang-orang awam di bidang hukum (Sinaga, 2013).

Dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga bantuan hukum BKBH UMS mendapat beberapa kendala yaitu tentang biaya yang didapat dari pemerintah yang tidak mampu mengcover seluruh kasus atau perkara yang masuk ke BKBH UMS, sedikitnya advokat yang mau berkomitmen, asumsi dari masyarakat bahwa semua orang akan mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, jadi banyak orang-orang mampu yang meminta untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain ketiga kendala tersebut dalam menjalankan

perannya BKBH UMS tidak menemukan masalah atau kendala lain yang mampu menghambat tugas serta peran BKBH UMS sebagai Lembaga Bantuan Hukum. Karena BKBH UMS sering menjalankan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung. Sebagai contoh BKBH UMS rutin menjalankan bantuan hukum secara non litigasi seperti penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat yang sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan penyuluhan atau pemberdayaan masyarakat oleh BKBH UMS, sehingga masyarakat diharapkan lebih sadar hukum.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dalam mendapat keadilan. Terhadap hal ini maka disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak mampu. Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, pelaksanaan Undang-Undang ini dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum untuk lebih dapat bergerak bebas dan leluasa tetapi tetap dalam koridor hukum di dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat luas khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu. Pengaturan pemberian bantuan hukum yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik, dengan adanya Undang- Undang No 16 tahun 2011 yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dan kemudian ditindak lanjuti dengan Kementrian Hukum dan HAM yang membentuk OBH (organisasi bantuan Hukum) atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang sudah disertifikasi. Setelah dilakukan sertifikasi kemudian ditetapkan Pengaturan pemberian bantuan hukum yang ada di Indonesia telah berjalan dengan baik ditambah adanya pengawasan secara langsung maka

masyarakat-masyarakat khususnya yang menjadi sasaran Undang- Undang No 16 Tahun 2011 tersebut dapat mengakses bantuan hukum tersebut secara gratis.

Kedua, Lembaga bantuan hukum merupakan Lembaga non profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun bukan hanya tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum. fungsi dari LBH dalam proses penyelesaian perkara perdata didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya. Semua jasa yang diberikannya ini diberikan secara Cuma-Cuma dan dalam peradilan perdata, yang dimana hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan sehingga penting sekali fungsi LBH sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar. Karena dalam perkara perdata inisiatif mengajukan gugatan datangnya dari pihak yang bersangkutan atau dari pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Hal ini juga menjadi Peranan Lembaga Bantuan Hukum untuk lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus yang miskin ataupun yang buta hukum bahwa mereka juga mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum, tidak pasrah karena tidak dapat membayar jasa Advokat. Dalam proses peradilan perdata ini terdiri dari tahap-tahap yang dilewati untuk menyelesaikan perkara tersebut.

4.2 Saran

Pertama, Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, serta sarana prasarana, dan Penegakan kembali seluruh aturan hukum yang telah diatur tentang wajibnya pemberian dan pendampingan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan hukum dan penanganan terhadap masyarakat tidak mampu sehingga hak-hak masyarakat tidak mampu terkait pemberian bantuan hukum dapat terpenuhi.

Kedua Berkaitan dengan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan Lembaga Bantuan Hukum seharusnya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan kepada seluruh masyarakat baik masyarakat tidak mampu maupun masyarakat yang

mampu sehingga kesadaran masyarakat meningkat tentang bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hak untuk masyarakat tidak mampu, jadi perkara yang masuk hanya dari masyarakat tidak mampu, sehingga biaya yang diterima dapat mengcover seluruh kasus yang masuk dan masyarakat tidak mampu dapat memperjuangkan haknya dimuka hukum terkhusus dalam sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Ahmad Ulil dan Samekto, FX Adji. (2013). *Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*, Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang.
- Entah, Aloysius R. (2016). *Indonesia : Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila*, seminar Nasional hukum, vol 2 no 1 533-542, 2016, fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang : Jawa Timur.
- Fulthoni, AM, Siti Aminah & Sihombing, Uli Parulian. (2009). *Mengelola Legal Clinic*: ILRC. Jakarta.
- Ginsberg, Morris. (2003). *Keadilan Dalam Masyarakat*, Bantul : Pondok Edukas.
- Harahap, M.Yahya. (2006). *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendra, Rahmad. (2016). *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsudi Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1.
- Kusnadi, Didi. (2012). *Bantuan Hukum Dalam Islam Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktiknya Di Lingkungan Pengadilan*, Bandung : CV pustaka Setia.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. (2016). *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, jurnal Arena Hukum, Universitas Islam Indonesia Vol. 9, Nomor 2, Agustus 2016.
- Sinaga, Ramses Harry Doan. (2013). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata (Studi Di Lbh Medan Dan Lbh Trisila Sumatera Utara)*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif : Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sutiyoso, Bambang. (2010). *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

- Syahrani, Abdurrahman Riduan. (1978). *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Wilujeng, Sri Rahayu. (2013). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang.
- Winarta, Frans Hendra. (2000). *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta :PT Elex Media Komputindo.
- Winarta, Frans Hendra. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta, Elex Media Komputindo.